

## ANALISIS HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MAKROEKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Tiara Juniar Soewardia<sup>a</sup>, Candra Fajri Ananda<sup>b</sup>, Angga Erlando<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.165 Malang, Indonesia, Email: tiarajuniar244@gmail.com

<sup>b</sup> Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.165 Malang, Indonesia, Email: candra064@gmail.com

<sup>c</sup> Universitas Airlangga Jl. Airlangga No.4 Surabaya, Indonesia, Email: erlandoangga@gmail.com

### ABSTRAK

*Local tax enforcement has always been the main objective of fiscal sustainability in developing countries. As in Indonesia, local government expand their tax base by Law No. 28/2009 as an effort to increase their local own revenue and support the macroeconomic performance. From 11 local taxes, there are only 3 local taxes that have the highest contribution to local own revenue, namely Street Lighting, Property, and Hotel and Restaurant Taxes. The purpose of this study is to analyst the correlation between local tax to regional economic growth and vice versa, using TSLS from a sample of 38 regencies and municipalities in East Java Province. Our study found that there is a simultaneity relation between Local Taxes and Economic Growth. However, the effect of Local Tax to economic growth is higher than the effect of Economic Growth to Local Tax. In addition, the study also found that the most elastic tax on changes in economic growth are hotel and restaurant taxes.*

*Keywords: Local Taxes, Regional Economic Growth, Local Tax Capacity, Local Taxing Power.*

Dorongan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pajak daerah dalam rangka keberlangsungan fiskal telah menjadi fokus utama pemerintah di negara-negara berkembang. Di Indonesia, reformasi perpajakan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pajak dan meningkatkan makroekonomi daerah dengan memperluas basis pajak daerah. Dari 11 pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia, hanya tiga pajak daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi, yaitu pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, dan pajak properti (BPHTB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pajak daerah terhadap pertumbuhan daerah maupun sebaliknya menggunakan analisis TSLS dengan 38 sampel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang simultan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pajak daerah yang paling elastis terhadap perubahan pada pertumbuhan ekonomi adalah pajak hotel dan restoran.

**KATA KUNCI:** Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kapasitas Pajak Daerah, *Local Taxing Power*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Karakteristik desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan salah satunya adalah *local taxing power*, yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dari penerimaan daerah, khususnya pajak daerah. Adanya *local taxing power* diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Pajak Daerah yang dapat dipungut dan sesuai dengan Undang-Undang berlaku (Adisasmita 2011). Konteks tersebut juga mengarah pada fungsi redistribusi, sebab penerimaan pajak akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program, seperti subsidi atau belanja publik yang diperuntukkan pada masyarakat. Keberadaan pajak sebagai redistribusi pendapatan sangatlah penting untuk keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan.

Seperti yang disebutkan oleh Bruckner (2012), perhitungan elastisitas pajak menjadi sangat penting untuk analisis jangka panjang mengenai evolusi serta keberlangsungan dari defisit fiskal. Dengan mengetahui seberapa besar elastisitas pajak, maka dapat memperkirakan sejauh mana kondisi fiskal akan defisit. Elastisitas, seperti yang dijelaskan oleh Noord (2000), merupakan respon elastisitas jangka pendek dari pendapatan pajak terhadap perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berarti, elastisitas merupakan respon (*immediate impact*) dari perubahan PDB terhadap pendapatan pajak. Elastisitas pendapatan pajak ialah persentase perubahan pendapatan pajak akibat adanya persentase perubahan dalam PDB, sebab PDB merupakan parameter penting untuk meramalkan dampak kebijakan fiskal dalam makroekonomi (Bruckner 2012). Elastisitas pendapatan pajak juga menjadi salah satu parameter dalam analisis empiris untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal terhadap perkembangan iklim bisnis yang terjadi.

Konsep elastisitas pajak didefinisikan sebagai ukuran kenaikan penerimaan pajak (satuan persen) yang dihasilkan dari perubahan endogen dalam basisnya, karena adanya kenaikan PDB (dalam persen). Elastisitas pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *tax-to-base elasticity* (elastisitas basis terhadap pajak) dan *base-to-income elasticity* (elastisitas pajak terhadap pendapatan/PDB). *Base-to-income elasticity* juga biasa disebut dengan *tax to income elasticity* (Kargbo 2012). Sementara itu, penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, dari sistem perpajakan yang digunakan, hal ini akan berkaitan dengan *fiscal drag*; kedua, dipengaruhi oleh perubahan pada tarif pajak dan kondisi-kondisi lain yang dapat mempengaruhi pajak terutang atau kewajiban pajak (*tax liability*), dan; ketiga, dipengaruhi oleh perubahan pada penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Adapun ukuran yang biasa digunakan untuk *fiscal drag* ialah elastisitas penerimaan pajak (Creedy 2008).

Disisi lain, dalam teori *Aggregate Output Keynesian* menyebutkan bahwa salah satu komponen yang membentuk PDB adalah pajak. Teori ini menjelaskan bahwa jika ada perubahan (kenaikan) pada penerimaan pajak, maka akan berdampak pada penurunan pada *disposable income* atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat. Dengan menurunnya konsumsi akibat kenaikan pajak, pada akhirnya akan berdampak pada penurunan PDB (Mankiw 2007).

Menjadikan kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai sampel pelaksanaan desentralisasi fiskal, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan fiskal dan makroekonomi di berbagai daerah. Sebab Jawa Timur masuk ke dalam provinsi andalan penyumbang pajak terbesar, laju pertumbuhan yang relatif tinggi (diatas pertumbuhan nasional), pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan DKI Jakarta, dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Kebijakan fiskal yang akan dilihat hubungannya dengan faktor makroekonomi akan menggunakan 3 ukuran pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan pemerintah di Jawa Timur, meliputi: Pajak PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hotel dan Restoran.

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan endogenitas antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dalam teori elastisitas pajak, besar kecilnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh basis pajak yaitu PDB. Akan tetapi, di sisi lain terdapat teori *Aggregate Output Keynesian*, yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi komponen pembentuk PDB ialah pajak. Berdasarkan kedua

teori tersebut, perlu dibuktikan apakah ada hubungan simultanitas antara pajak daerah dengan PDB.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Kebijakan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follow function*. Dengan mengikuti konsep *money follows function*, semakin besar fungsi yang didaerahkan akan membuat jumlah dana yang disalurkan ke daerah juga harus semakin besar (Sidik 2002). *Money follow function* merupakan konsep dimana dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerahnya (Khusaini, 2006).

Tujuan umum dari pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain harus dapat menjamin (Sidik 2002): (1) Kestinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro; (2) Peningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan pemerintah dengan mengadakan koreksi atas adanya ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) dan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*); (3) Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, dapat memperbaiki struktur fiskal, dan dapat memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional; (4) Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (5) Kepastian mengenai adanya pelayanan publik yang berkualitas di setiap daerah dan perbaikan keseimbangan fiskal antar daerah, dan; (6) Penciptaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dalam setiap perekonomian, struktur pajak dan administrasi pajak yang efektif dan efisien merupakan hal yang paling penting dalam mencapai *fiscal sustainability* dan mencapai pembangunan ekonomi dan sosial. Efektif berarti bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB setidaknya harus di atas rata-rata (Sujjapongse 2005). Efisien berarti bahwa biaya administrasi pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak. Apabila kedua hal tersebut dapat dicapai maka sistem perpajakan yang efektif dan efisien bisa tercapai.

### 2.2. Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator* (Suparmoko 1982; Adisasmita 2011): (1) fungsi penerimaan (*budgeter*), dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran/ belanja pemerintah, dan; (2) fungsi mengatur (*regulatory*), dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik, yang disebut dengan "Smith's Canons", meliputi: (1) prinsip keadilan (*equity*); (2) prinsip kepastian (*certainty*), (3) prinsip finansial/kelayakan (*convenience*), dan; (4) prinsip ekonomi (*economy*). Adapula keempat prinsip *Smith's Cannon* ini kemudian dilengkapi dengan prinsip ketepatan (*adequate*).

Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Seluruh administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) atau

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, meliputi: (1) Pajak Penghasilan (PPh); (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan; (4) Bea Materai.

Sementara itu terdapat pula pajak daerah yang dilatar belakangi beberapa hal antara lain: (1) dominansi transfer pemerintah pusat dalam APBD yang terlalu besar menyebabkan adanya tuntutan kemandirian keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya melalui PAD; (2) adanya peningkatan sumber-sumber pembiayaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat menurunkan tingkat ketergantungan pembiayaan pemerintah daerah pada pemerintah pusat; (3) pajak daerah dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan; (4) memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan dari pajak daerahnya guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintahan daerahnya. (Mardiasmo 2004; Kuncoro 2004). Selain itu, pajak daerah juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi, dan pajak Kabupaten/Kota.

**2.3. Elastisitas Pajak**

Konsep elastisitas pajak didefinisikan sebagai ukuran kenaikan penerimaan pajak (dalam persen) yang dihasilkan dari perubahan endogen dalam basisnya yang disebabkan oleh kenaikan PDB (dalam persen). Elastisitas pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *tax-to-base elasticity* (elastisitas pajak terhadap basis) dan *base to income elasticity* (elastisitas basis terhadap pendapatan/PDB). Koefisien elastisitas penerimaan pajak ( $E_f/Y$ ) ialah ukuran, bagian ataupun persentase perubahan beban pajak sebagai akibat dari perubahan pada pertumbuhan ekonomi ataupun perubahan pada variabel lain.

$$\frac{E_f}{Y} = \frac{\Delta\%TR}{\Delta\%Y} = \frac{\frac{\Delta TR}{TR_0} \times 100}{\frac{\Delta Y}{Y_0} \times 100} = \frac{\Delta TR}{TR_0} \div \frac{\Delta Y}{Y_0} = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \times \frac{Y_0}{TR_0} \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana TR = *Tax Revenue* (penerimaan pajak) , dan Y = Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, elastisitas pajak dapat pula dicari dengan menggunakan regresi rumus berikut (Kargbo 2012).

$$\ln T = \ln \alpha + \beta \ln Y + \varepsilon \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana  $\alpha$  = konstanta yang menunjukkan pungutan/penerimaan pajak jika basis pajak adalah nol,  $\beta$  = *marginal rate* dari pajak, T = penerimaan pajak, Y = output (PDB), dan  $\varepsilon$  = variabel gangguan stokastik. Rumus tersebut menggunakan bentuk *double log*, sehingga dapat menyediakan estimasi dari elastisitas pajak karena rumus tersebut mengukur respon persentase penerimaan pajak (Kargbo 2012).

Tabel 1 Elastisitas Penerimaan Pajak  
Sumber: Bunescu, 2013

Simbol	Jenis Elastisitas	Pengaruh
$ E_f/Y  = \infty$	Penerimaan Pajak Elastisitas Sempurna	Perubahan kecil (minimum) pada Pertumbuhan Ekonomi akan mengakibatkan perubahan yang besar (maksimum) pada penerimaan pajak
$ E_f/Y  > 1$	Penerimaan Pajak Elastis	Perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada penerimaan pajak (lebih besar daripada proporsional)
$ E_f/Y  = 1$	Penerimaan Pajak Unitary Elastis	Perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan pada penerimaan pajak sebesar 1%
$ E_f/Y  < 1$	Penerimaan Pajak Inelastis	Perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi akan mengakibatkan perubahan yang kecil pada penerimaan pajak (lebih kecil daripada proporsional)
$ E_f/Y  = 0$	Penerimaan Pajak Inelastis Sempurna	Perubahan yang sangat besar pada Pertumbuhan Ekonomi (maksimum) tidak akan memberikan dampak pada perubahan penerimaan pajak

#### 2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu Negara atau daerah ialah indikator pertumbuhan ekonomi. Pada suatu periode tertentu pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada masyarakat. *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang mengukur jumlah output barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu Negara, dalam wilayah Negara tersebut, baik oleh penduduknya (warga Negara sendiri) maupun bukan penduduk (warga Negara asing/perusahaan asing) tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri (Todaro 2006).

Inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan dengan dua hal, yaitu teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah (Adisasmita 2011). Menurut Adisasmita, teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, antara lain: (1) teori basis ekonomi, yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah; (2) teori kawasan, yang mendasarkan pada sifat nasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin; (3) teori daya tarik industri, merupakan teori yang membangun portofolio industri di suatu daerah karena dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam teori *Aggregate Output* yang dikemukakan oleh Keynes, menyatakan bahwa Output Agregat dalam suatu negara dipengaruhi oleh variabel konsumsi, investasi, dan kebijakan fiskal, dimana komponen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol perekonomian ialah pajak dan belanja pemerintah. Pajak dan belanja pemerintah memiliki dampak yang berbeda terhadap output agregat, dimana belanja pemerintah perlu ditingkatkan oleh pemerintah jika

ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian, sebaliknya pada pajak harus diturunkan jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### 2.4.1. *Keynesian Theory of Growth*

Persamaan identitas yang paling terkenal dan sering digunakan dalam pengembangan model pertumbuhan ekonomi sampai saat ini adalah model Keynesian tentang pertumbuhan ekonomi atau permintaan agregat. Ketika output sama dengan permintaan agregat, maka keseimbangan akan terjadi (Mankiw 2007).

$$Y = AD \dots\dots\dots(3.3)$$

Dalam mencapai keseimbangan permintaan agregat, salah satunya dengan mempertimbangkan keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan pasar barang dicapai apabila total konsumsi, investasi dan belanja pemerintah sama dengan *total aggregate expenditure*. Adapun dalam persamaan konsumsi Keynesian terdapat dua variabel yang mempengaruhinya, yaitu pendapatan dan pajak, atau fungsi dari *disposable income*. *Disposable income* adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, artinya pendapatan dari individu atau masyarakat dikurangi dengan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut (Froyen 2002):

$$Y = C + I + G \dots\dots\dots(3.4)$$

$$C = C (Y - T) \dots\dots\dots(3.5)$$

*Keynesian theory of growth* mengilustrasikan bahwa dalam kebijakan fiskal, baik pajak maupun belanja pemerintah memiliki dampak terhadap *aggregate output*. Dimana belanja pemerintah memiliki dampak langsung terhadap *aggregate output*, sebaliknya pajak memiliki dampak tidak langsung. Adanya pemotongan penerimaan pemerintah (dari pajak) akan berdampak pada kenaikan *disposable income* yang berujung kepada peningkatan daya beli dan *marginal propensity to consume* (MPC) dari masyarakat akan meningkat pula. Notasi persamaan identitas Keynesian menyebutkan, jika ada kenaikan pada fungsi konsumsi, maka *aggregate output* juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya (Froyen 2002).

#### 2.5. Tinjauan Literatur

Desentralisasi fiskal adalah langkah menuju penegakan *local taxing power* dengan memperluas kapasitas pajak pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 28 tahun 2009, pemerintah daerah di Indonesia sekarang memiliki wewenang untuk meningkatkan basis atau tarif pajak untuk mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi dalam rangka pembangunan daerahnya. Dalam ilmu ekonomi, struktur pajak dan administrasi pajak yang efektif dan efisien merupakan faktor penting untuk mencapai kesinambungan fiskal dan beberapa tingkat pembangunan ekonomi dan sosial. Efektif di sini berarti penerimaan pajak terhadap rasio PDB setidaknya lebih dari rata-rata (Sujjapongse 2005).

Ada beberapa penelitian yang menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara lain, akan tetapi studi yang berfokus pada pajak daerah sebagai indikator kebijakan fiskal dan indikator pertumbuhan ekonomi cukup jarang dilakukan. Lee (2013) berpendapat bahwa negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi memiliki perilaku yang sama dalam hal siklus bisnisnya. Selain

itu, ia menambahkan bahwa perilaku kebijakan fiskal tidak memiliki korelasi dan dampak positif terhadap variabel ekonomi. Selain itu, penelitian Lee juga menganalisis kontribusi variabel politik terhadap siklus bisnis di negara OECD.

Dalam penelitian lain, Amir *et al.* (2013) menemukan tiga dampak signifikan berdasarkan perubahan antara perubahan pendapatan pajak dan pendapatan pemerintah. Mereka mencatat bahwa kerugian pada pendapatan pemerintah akan menyebabkan penurunan output, yang akhirnya mengarah pada kondisi kapasitas fiskal yang memburuk. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengevaluasi kondisi pajak pada variabel makroekonomi setelah reformasi pajak di Indonesia. Hasil yang diperoleh dimaksudkan untuk berkontribusi pada skenario pembuatan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas pajak dan kapasitas fiskal di Indonesia dengan menggunakan Analisis CGE.

Studi lain yang dilakukan oleh Kaminsky *et al.*, (2004) meneliti kondisi pro-siklikal kebijakan fiskal dan PDB. Temuannya adalah bahwa kebijakan fiskal *countercyclical* akan berjalan dengan baik (buruk) dengan menurunkan (meningkatkan) belanja pemerintah dan meningkatkan pajak. Ini dianggap sebagai kebijakan yang dapat menstabilkan siklus bisnis. Kebijakan fiskal pro-siklikal akan berjalan dengan baik (buruk) dengan meningkatkan (menurunkan) belanja pemerintah dan meningkatkan pajak. Kebijakan ini diambil jika tujuan kebijakan ialah memperkuat siklus bisnis. Kebijakan lain adalah kebijakan fiskal yang bersifat *acyclical* yang merupakan kasus stokastik dari belanja pemerintah dan tarif pajak yang tidak berdampak pada siklus bisnis. Pada negara berkembang, belanja pemerintah dan pajak sangat *pro-cyclical*, yaitu belanja pemerintah akan naik dan pajak akan turun pada kondisi ekspansi ekonomi, sebaliknya pajak akan naik dan belanja pemerintah akan turun ketika resesi (Talvi dan Vegh 2005).

Kontras dengan penemuan Bajo-Rubio *et al.*, (2015) yang menunjukkan bahwa ketika belanja daerah naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik, sebaliknya jika belanja daerah naik pertumbuhan ekonomi akan turun. Pemotongan belanja daerah memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap penurunan PDB, artinya dengan pemotongan belanja daerah, PDB dan belanja daerah akan memiliki hubungan yang prosiklikal, dalam teori siklus bisnis. Berdasarkan tinjauan literatur maka teori hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga pertumbuhan ekonomi dan populasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Diduga penerimaan pajak daerah, investasi daerah dan belanja daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga terdapat hubungan simultanitas antara penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap elastisitas pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak daerah BPHTB.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Langkah awal yang dilakukan adalah mengetahui hubungan antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori elastisitas pajak, untuk mengetahui apakah pajak tersebut elastis atau tidak terhadap perekonomian, kita dapat melihatnya dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan dalam Teori *Agregat Output* yang dikemukakan oleh Keynes, bahwa *Agregat Output* dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya ialah Pajak.

Setelah mengidentifikasi hubungan antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian penelitian ini akan mengidentifikasi, dari ketiga pajak yang digunakan dalam penelitian ini, manakah pajak yang memiliki elastisitas paling besar. Tiga jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar pada penerimaan pajak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur secara berurutan adalah Pajak Properti, dalam hal ini adalah BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hotel dan Restoran.

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kausalitas antar variable. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena tertentu (Zulganef 2008). Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengetahui pengaruh atau seberapa besar respon elastisitas dari adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan pada penerimaan pajak daerah. Selain itu, dengan penelitian ini akan dapat diketahui apakah terdapat hubungan simultanitas antara penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Kementerian Keuangan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: (1) Data PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011 sampai dengan 2014; (2) Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tahun 2011 sampai dengan 2014; (3) Data Populasi Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tahun 2011 sampai dengan 2014; (4) Data Investasi Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tahun 2011 sampai dengan 2014; (5) Data Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tahun 2011 sampai dengan 2014, dan; (5) Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2009 sampai dengan 2015 semester I menurut lokasi proyek

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ialah definisi dari tiap variabel berdasarkan karakteristik yang diamati. Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pajak Daerah, merupakan total dari tiga pajak daerah (Pajak Hotel dan restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Properti (BPHTB)) yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan dari sisi pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data Pajak Daerah diperoleh dari data realisasi DJPK Kementerian Keuangan dan data BPS dari buku Statistik Keuangan Pemerintah kabupaten/kota.
2. Pajak Hotel dan Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran.
3. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
4. Pajak Properti terdiri dari dua pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB. Akan tetapi pajak Properti yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah pajak BPHTB karena pajak

PBB-P2 baru saja resmi secara keseluruhan dialihkan menjadi pajak daerah sejak tahun 2014 saja.

5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, merupakan besaran Pertumbuhan Ekonomi dari tiap-tiap daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
6. Variabel Populasi. Variabel ini mencerminkan jumlah populasi dari tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
7. Variabel Investasi Daerah. Variabel ini mencerminkan ada atau tidaknya Investasi yang terjadi di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun tertentu.
8. Variabel Belanja Daerah. Variabel ini mencerminkan besaran Belanja Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

### 3.4. Metode Analisis Data

Model yang digunakan pada penelitian ini ada dua model, yang pertama, yaitu model persamaan simultan dengan metode penelitian *Two Stage Least Squares* (TSLS) untuk mengetahui apakah terdapat hubungan simultanitas yang terjadi antara variabel Penerimaan Pajak Daerah dan variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada model yang kedua akan dibahas mengenai ialah model untuk pengujian elastisitas pada penerimaan pajak daerah, yang dilakukan pada tiga kategori pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Properti dan Pajak Hotel dan Restoran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian elastisitas ini akan merujuk pada metode penelitian yang dilakukan oleh John Creedy dan Norman Gemmell (2008).

Model elastisitas pajak, dimana menunjukkan seberapa elastis penerimaan pajak akan dipengaruhi oleh perekonomian, dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penerimaan pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu jumlah populasi. Populasi dalam model ini merupakan variabel kontrol, yang mana salah satu tujuan adanya variabel control adalah untuk meminimalisir adanya bias dalam model. Sehingga, fungsi persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PD_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{i,t} + \alpha_2 Pop_{i,t} + u_{i,t} \dots \dots \dots (3.6)$$

Model makroekonomi tiga sektor Keynesian (teori *Aggregate Output*), ketika ditambahkan variabel dari kebijakan fiskal, yaitu pajak, maka persamaannya adalah:

$$Y = C (Y - T) + I + G \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana komponen Konsumsi, Pajak, Investasi dan Belanja Pemerintah merupakan komponen pembentuk *aggregate output*. Sedangkan identitas dari model makroekonomi tiga sektor, dimana *aggregat output* dihasilkan dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PD_{i,t} + \beta_2 ID_{i,t} + \beta_3 BD_{i,t} + u_{i,t} \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana:

- $PD_{i,t}$  = log dari penerimaan pajak penerangan jalan, hotel dan restoran, dan properti yang dipungut oleh pemerintah daerah i dan tahun t;
- $Y_{i,t}$  = log dari Pertumbuhan Ekonomi pada daerah i dan tahun t;

- $\beta_2ID_{i,t}$  = log dari Investasi Daerah pemerintah daerah i dan tahun t;
- $\beta_3BD_{i,t}$  = log dari Belanja Daerah pemerintah daerah i dan tahun t;
- $\alpha_2Pop_{i,t}$  = log dari Jumlah Populasi pada daerah i dan tahun t;
- $u_{i,t}$  = *error term* (tingkat kesalahan) dari estimasi

Pada persamaan 3.6 dan 3.8, penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi ditentukan secara bersama, yaitu penerimaan pajak daerah ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penerimaan pajak daerah. Model ini Y dan PD disebut sebagai variabel endogen karena nilai keduanya ditentukan dalam sistem persamaan 3.6 dan 3.8. Sehingga kedua persamaan tersebut merupakan model persamaan simultan.

### 3.5. Persamaan Bentuk Turunan

Untuk menjelaskan variabel endogen PD dan Y sebagai fungsi dari variabel eksogen ID, BD, dan Pop kedua persamaan (3.6) dan (3.7) harus dapat diselesaikan, atau direformulasi. Bentuk turunan (*reduced form*) dari persamaan tersebut digunakan untuk memahami sistem persamaan struktural dan menemukan nilai dari kedua variabel endogen PD dan Y.

Untuk mendapatkan persamaan *reduced form*, langkah pertama yang harus dilakukan dengan mensubstitusikan persamaan Y (3.7) ke dalam persamaan PD (3.6), sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PD &= \alpha_0 + \alpha_1 (\beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 ID + \beta_3 BD) + \alpha_2 Pop + e_t \\
 PD &= \alpha_0 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_1 \beta_1 PD + \alpha_1 \beta_2 ID + \alpha_1 \beta_3 BD + \alpha_2 Pop + e_t \\
 PD - \alpha_1 \beta_1 PD &= \alpha_0 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_1 \beta_2 ID + \alpha_1 \beta_3 BD + \alpha_2 Pop + e_t \\
 PD (1 - \alpha_1 \beta_1) &= \alpha_0 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_1 \beta_2 ID + \alpha_1 \beta_3 BD + \alpha_2 Pop + e_t
 \end{aligned}$$

$$PD = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_0}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_2 ID}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_3 BD}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_2 Pop}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{1}{1 - \alpha_1 \beta_1} e_t$$

$$PD = \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_2 ID + \Pi_3 BD + \Pi_4 Pop + v_t \dots \dots \dots (3.9)$$

Dimana  $\Pi_0, \Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ , adalah parameter *reduced form*, dan  $v_t$  adalah *residual reduced form*. Persamaan *reduced form* (3.7) merupakan persamaan model regresi sebelumnya, oleh karena itu kita dapat menyelesaikan persamaan *reduced form* tersebut dengan menggunakan metode OLS untuk mencapai parameter *reduced form*  $\Pi_0, \Pi_1, \Pi_2, \Pi_3$ , dan  $\Pi_4$ .

Sebagaimana persamaan *reduced form* untuk PD, untuk Y juga kita estimasi dengan metode OLS. Nilai parameter persamaan *reduced form* mempunyai dua arti. Pertama, parameter *reduced form* adalah angka multiplier dari variabelnya, yaitu  $\Pi_2$  adalah multiplier investasi daerah (ID), dan seterusnya. Kedua, dari persamaan *reduced form* tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada berbagai tingkat Investasi Daerah.

Untuk mencapai persamaan *reduced form* untuk variabel Y, maka kita harus memasukkan variabel C yang kita peroleh dari persamaan (3.9) ke dalam persamaan (3.6), sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \left( \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_0}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_2 ID}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_1 \beta_3 BD}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{\alpha_2 Pop}{1 - \alpha_1 \beta_1} + \frac{1}{1 - \alpha_1 \beta_1} e_t \right) + \beta_2 ID + \beta_3 BD$$

$$\begin{aligned}
 Y &= \beta_0 + \beta_1 \left( \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_1\beta_0}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_2Pop}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{1}{1 - \alpha_1\beta_1} e_t \right) + \frac{\alpha_1\beta_1\beta_2ID}{1 - \alpha_1\beta_1} + \beta_2ID \\
 &\quad + \frac{\alpha_1\beta_1\beta_3BD}{1 - \alpha_1\beta_1} + \beta_3BD \\
 Y &= \beta_0 + \beta_1 \left( \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_1\beta_0}{1 - \alpha_1\beta_1} \right) + \frac{\beta_2ID}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\beta_3BD}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_2\beta_1Pop}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\beta_1}{1 - \alpha_1\beta_1} e_t \\
 Y &= \frac{\beta_0}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_0\beta_1}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\beta_2ID}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\beta_3BD}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\alpha_2\beta_1Pop}{1 - \alpha_1\beta_1} + \frac{\beta_1}{1 - \alpha_1\beta_1} e_t \dots\dots\dots(3.10)
 \end{aligned}$$

**3.6. Metode Analisis Data Elastisitas Pajak Daerah**

Elastisitas dari penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan dari respon atau reaksi penerimaan pajak akibat perubahan atau fluktuasi pada perekonomian. *Null value* dari elastisitas pajak mengindikasikan bahwa akibat banyaknya variasi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan wajib pajak memiliki alasan untuk tidak membayar pajak sehingga akan menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak.

$$\text{Elastisitas Pajak} = \frac{\text{perubahan relatif pada penerimaan pajak}}{\text{perubahan relatif pada GDP}}$$

Elastisitas pajak menunjukkan rasio dari perubahan relatif pada penerimaan pajak dengan perubahan relatif pada GDP, atau dalam hal ini adalah laju pertumbuhan ekonomi, pada wilayah yang telah di tentukan. Selain itu juga menunjukkan bagaimana sensitivitas dari pajak langsung dan tidak langsung terhadap perubahan pada pertumbuhan ekonomi maupun perubahan-perubahan lain pada penerimaan publik (Bunescu 2011).

Diasumsikan pada satu daerah, penerimaan pajak daerah adalah PD dan Pertumbuhan Ekonomi adalah Y, sehingga persamaan dasar untuk mengestimasi parameter elastisitas penerimaan pajak ( $\epsilon$ ) adalah:

$$EPD_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 Y_{i,t} + \beta_2 Pop_{i,t} + u_{i,t} \dots\dots\dots(3.11)$$

Dimana  $PD_{i,t}$  adalah log dari penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah i dan tahun t; Y adalah log dari Pertumbuhan Ekonomi riil pada daerah i dan tahun t;  $\alpha_i$  adalah *Fixed Effects* dari daerah;  $\beta_2 Pop_{i,t}$  adalah log dari Jumlah Populasi pada daerah i dan tahun t; sedangkan  $u_{i,t}$  ialah *error term* dari estimasi.

Penelitian juga akan melihat bagaimana perilaku dari ketiga pajak daerah yang dilihat dari elastisitasnya Elastisitas penerimaan ketiga pajak daerah dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$EPD_{PPj,t} = \alpha_i + \beta_1 Y_{i,t} + \beta_2 Pop_{i,t} + u_{i,t} \dots\dots\dots(3.11)$$

$$EPD_{HRi,t} = \alpha_i + \beta_1 Y_{i,t} + \beta_2 Pop_{i,t} + u_{i,t} \dots\dots\dots(3.12)$$

$$EPD_{Propi,t} = \alpha_i + \beta_1 Y_{i,t} + \beta_2 Pop_{i,t} + u_{i,t} \dots\dots\dots(3.13)$$

Dimana:

- $EPD_{PPj,t}$  = log penerimaan pajak penerangan jalan daerah i dan tahun t;  
 $EPD_{HRi,t}$  = log dari penerimaan pajak hotel dan restoran daerah i dan tahun t;  
 $EPD_{Propi,t}$  = log dari penerimaan pajak properti daerah i dan tahun t;  
 $Y_{i,t}$  = log dari Pertumbuhan Ekonomi pada daerah i dan tahun t;  
 $\alpha_i$  = *Fixed Effects* dari daerah;  
 $\beta_2 Pop_{i,t}$  = log dari Jumlah Populasi pada daerah i dan tahun t;  
 $u_{i,t}$  = *error term* dari estimasi  
i = 1, ..., n daerah  
t = 2012, ...t tahun

Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*, yang dikenal dengan regresi data panel (*Panel Pooled Data*). Dalam menentukan teknik yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga uji, yaitu Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji Chow), Uji Signifikansi *Random Effect*, dan Uji Signifikansi Hausman.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Uji *Two Stage Least Square*

Dalam kasus persamaan simultan pada penelitian ini, setelah diuji diketahui bahwa kedua persamaan ialah *just-identified*. Artinya, bahwa persamaan simultan dalam penelitian ini dapat diestimasi. Langkah selanjutnya, persamaan simultan diestimasi dengan menggunakan metode estimasi TSLS. Berikut disajikan hasil estimasi TSLS Pajak Daerah dan Pertumbuhan.

Tabel 2 Hasil estimasi TSLS Pajak Daerah dan Pertumbuhan

<b>Persamaan 1 : Variabel Endogen Ln PD</b>				
Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas (t)	Keterangan
Konstanta	-47.71759	-2.736015	0.0073	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Y	0.047597	1.699266	0.0921	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln Pop	9.843771	3.327499	0.0012	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
R-square = 0.990020				
Adjusted R-square = 0.986175				
F-statistic = 257.4594				
Prob. (F) = 0.000000				
<b>Persamaan 2 : Variabel Endogen Y</b>				
Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas (t)	Keterangan
Konstanta	-34.50334	-3.613607	0.0005	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln PDFE	3.678188	4.116262	0.0001	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
ID	0.003437	0.066091	0.9474	Tidak Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln BD	-0.232411	-1.645482	0.1028	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
R-square = 0.523262				

<b>Persamaan 1 : Variabel Endogen Ln PD</b>
Adjusted R-square = 0.333449
F-statistic = 2.756731
Prob. (F) = 0.000012

Berdasarkan hasil estimasi persamaan TSLS sebelumnya, maka didapatkan hasil persamaan akhir sebagai berikut:

$$PD = -47.71759 + 0.047597 Y + 9.843771 Pop$$

$$Y = -34.50334 + 3.678188 PDFE + 0.003437 ID - 0.232411 BD$$

#### 4.2. Hasil Uji Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah

Pengujian elastisitas dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketiga pajak daerah merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui manakah dari pajak daerah yang memiliki potensi paling besar untuk dapat didorong (*tax enforcement*) oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan hasil estimasi elastisitas untuk pajak daerah hotel dan restoran, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak daerah BPHTB (Tabel 3).

Tabel 3 Estimasi Elastisitas Pajak Daerah

<b>Estimasi 1 : Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran</b>				
Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas (t)	Keterangan
Konstanta	-7.580971	-0.209250	0.8346	Tidak Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Y	3.733353	4.221250	0.0000	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln Pop	-1.755242	-0.248030	0.8046	Tidak Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
R-square = 0.960228				
Adjusted R-square = 0.946379				
F-statistic = 69.33495				
Prob. (F) = 0.000000				
<b>Estimasi 2 : Elastisitas Pajak Penerangan Jalan</b>				
Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas (t)	Keterangan
Konstanta	-22.11328	-2.270021	0.0251	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Y	0.783123	3.293128	0.0013	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln Pop	4.511970	2.371206	0.0194	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
R-square = 0.992791				
Adjusted R-square = 0.990281				
F-statistic = 395.5132				
Prob. (F) = 0.000000				
<b>Estimasi 3 : Elastisitas Pajak Properti BPHTB</b>				
Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas (t)	Keterangan
Konstanta	2.350869	1.820931	0.0707	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Y	2.086212	9.178226	0.0000	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
Ln Pop	-1.338827	-4.549878	0.0000	Signifikan ( $\alpha = 10\%$ )
R-square = 0.386918				
Adjusted R-square = 0.378577				
F-statistic = 46.38614				
Prob. (F) = 0.000000				

### **4.3. Hubungan Antar Variabel**

#### **4.3.1 Hubungan Pertumbuhan dan Pajak Daerah**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang digunakan bagi pembuat kebijakan untuk menilai kondisi makro ekonomi daerah. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi selain digunakan untuk menilai kondisi makroekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa depan. Teori elastisitas pajak menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya, apabila ada perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi maka penerimaan pajak daerah juga mengalami perubahan, dimana hal ini kemudian dapat memberikan masukan bagi pemerintah bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga pemerintah dapat mendorong Pertumbuhan Ekonominya semakin lebih tinggi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bruckner (2012), bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase perubahan pada penerimaan pajak.

#### **4.3.2. Hubungan Populasi dan Pajak Daerah**

Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan adanya persentase perubahan populasi yang akan signifikan berpengaruh pada persentase perubahan penerimaan pajak daerah. Adapun hubungan antara populasi dengan penerimaan pajak daerah memiliki hubungan yang positif, artinya apabila ada persentase kenaikan pada populasi maka akan ada persentase kenaikan pula pada penerimaan pajak daerah, dimana apabila dilihat dari hasil penelitian ini ialah 9.5 persen.

Adapun hasil penelitian lain yang sesuai dengan hasil penelitian ini ialah penelitian oleh Sang-Hyop *et al.* (2016). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem perpajakan dan belanja yang baik tidak dapat menjamin keberlangsungan fiskal di Negara-negara Asia, akan tetapi adanya transisi struktur populasi yaitu Negara dengan jumlah usia muda lebih banyak cenderung memiliki kondisi fiskal yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan Goudswaard dan Van (1994) bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan penerimaan pajak akibat adanya perubahan pada pertumbuhan populasi. Penelitian ini dilakukan di Belanda dengan menggunakan data survei dan proyeksi untuk data populasi dan data pajak langsung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar 27 persen pada penerimaan pajak ialah akibat adanya pertumbuhan atau peningkatan pada populasi. Setelah tahun 2030, adanya penurunan dari penerimaan pajak akibat adanya penurunan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut.

#### **4.3.3. Hubungan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan**

Teori *Aggregate Output* Keynesian persamaan konsumsi dijelaskan bahwa komponen pembentuknya tidak lain ialah pajak. Apabila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhannya ekonominya, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menurunkan pajak. Sehingga PDB akan naik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila pemerintah daerah ingin menekan laju pertumbuhan ekonomi maka pemerintah dapat meningkatkan pajaknya sehingga PDB akan turun. Disini dapat disimpulkan bahwa pajak secara tidak langsung merupakan komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam prinsipnya, struktur pajak di suatu negara dapat mempengaruhi tiap-tiap determinan (lima) dari pertumbuhan GDP riil, dan kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan GDP riil itu sendiri. Akan tetapi, model

pertumbuhan neoklasik juga menyatakan bahwa perubahan pada struktur pajak seharusnya tidak memiliki dampak terhadap tingkat pertumbuhan dalam jangka panjang (Branson 2000). Penelitian oleh Hayford (2016) juga menunjukkan bahwa adanya perubahan pada kebijakan fiskal berupa penurunan pajak dapat menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0.54 dollar, yang kemudian akan berdampak pula pada kenaikan pada pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain bahwa hubungan antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi adalah signifikan negatif, sesuai dengan teori yang dikemukakan Keynesian.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh *Engen et al.* (1996), bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ialah signifikan dan memiliki hubungan yang positif, dimana apabila ada peningkatan pajak sebesar 2.5 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3 persen.

Hasil estimasi penelitian ini juga menunjukkan hal yang sama, dimana pada persamaan kedua didapatkan hasil bahwa pajak daerah secara signifikan positif memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila ada kenaikan pajak daerah sebesar 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 3.678 persen. Menurut Angelopoulos (2007), pajak yang berbeda akan memiliki dampak yang berbeda pula terhadap pertumbuhan. Pajak penghasilan individu memiliki dampak yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan, sedangkan pajak perusahaan memiliki dampak yang signifikan positif terhadap pertumbuhan.

Dalam model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1990), adanya belanja produktif dari pemerintah (belanja infrastruktur, sekolah atau pendidikan, sanitasi atau kesehatan), yang dibiayai dari pajak ialah mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Artinya, belanja produktif pemerintah sebagai investasi publik memiliki dampak terhadap produktivitas investasi privat, dimana belanja tersebut dibiayai dari pajak. Apabila investasi publik dan privat meningkat maka akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak dari pajak sendiri, apabila pajak yang dipungut dialokasikan untuk belanja yang produktif maka akan berdampak signifikan positif terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak dialokasikan untuk belanja konsumsi pemerintah (tidak produktif) justru akan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan.

Apabila dilihat dari model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1990), maka yang dimaksud pajak disini ialah pajak yang alokasinya digunakan untuk belanja konsumsi pemerintah (tidak produktif) akan memiliki dampak negatif. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak dialokasikan untuk belanja produktif pemerintah, maka akan memiliki dampak yang positif. Teori ini kemudian menjelaskan hasil dari penelitian ini, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan penerimaan pajak sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.68.

Tabel 4 Kondisi *Tax Ratio* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 2011 – 2014

Sumber: DJPK dan BPS, diolah penulis. 2017.

Tahun	Rata-rata <i>Tax Ratio</i> kab/kota	Jumlah kab/kota dengan <i>Tax Ratio</i>	
		di atas rata-rata	di bawah rata-rata
2011	0.18	11	27
2012	0.21	13	25
2013	0.27	14	24
2014	0.26	15	23

Perbandingan pajak terhadap kondisi perekonomian juga dapat kita lihat dari seberapa besar *tax ratio* pajak terhadap PDB. Dalam konteks pajak daerah, kita dapat melihat kondisi rasio pajak daerah melalui rasio antara total pajak daerah dengan PDRB. Kondisi *tax ratio* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat kita lihat pada tabel diatas. Tabel 4 menunjukkan rata-rata *tax ratio* yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, dimana secara umum menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Semakin tingginya *local tax ratio* diharapkan dapat mendorong pula pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat terjadi karena kondisi yang berbeda antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan studi kasus yang digunakan oleh Keynesian. Dengan melihat rata-rata *tax ratio* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terlihat bahwa masih banyak potensi pajak yang belum optimal dipungut oleh pemerintah daerah.

#### 4.3.4 Hubungan Investasi dan Pajak Daerah

Investasi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol yang pada persamaan kedua tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gui-Diby (2014) bahwa adanya investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sejak periode 1980 sampai dengan 2009 di Afrika. Peneliti lain Kaushik (2008) juga menyatakan bahwa variabel investasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap GDP di India.

Hasil yang tidak signifikan dan berbeda dengan penelitian sebelumnya dapat terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya: perbedaan sifat data yang dimiliki, prosedur pengujian, dan periode dari penelitian. Sifat data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data variabel *dummy*, karena tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki investasi, baik PMA maupun PMDN. Sehingga, untuk menghindari adanya ketidak-stasioneran data maka digunakan *dummy*, dimana 1 adalah terdapat investasi pada kabupaten/kota dan 0 adalah tidak ada investasi pada kabupaten/kota.

Pada tahun 2011, kondisi investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ialah masih didominasi oleh kabupaten/kota yang tidak memiliki investasi.

Tabel 5 Perkembangan Investasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010 – 2014

Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal, diolah penulis. 2017.

Tahun	Jumlah Investasi (Triliun Rp)	Rata-rata Investasi	Pertumbuhan Investasi (%)
2010	26.32	0.69	
2011	40.40	1.06	53.50
2012	53.87	1.42	33.34
2013	68.48	1.80	27.12
2014	61.84	1.63	-9.70

Hal ini dapat disebabkan karena kondisi ekonomi dan iklim investasi pada tahun 2012, 2013 dan 2014 masih lebih baik daripada tahun 2011. Adapun pada tahun 2011 sedang terjadi krisis ekonomi global di Eropa dan Amerika. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terlihat cenderung membaik.

Pada tahun 2014, kondisi investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, yaitu sebesar 9.70 persen daripada tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2014 melambat, selain itu inflasi yang tinggi akibat adanya kenaikan minyak dunia menjadikan performa ekonomi Indonesia kurang baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan penurunan dalam jumlah investasi di Indonesia, atau dalam hal ini termasuk daerah kabupaten/kota. Sungguhpun mengalami penurunan dalam jumlah nominal investasi, jumlah kabupaten/kota yang memiliki investasi justru semakin banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi semakin merata.

#### **4.3.5. Hubungan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pembentuk PDB, sesuai dengan teori *Keynesian Model of Growth*, yang kemudian dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini ialah belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan kemiripan dengan hasil penelitian Bajo-Rubio *et al.* (2015). Dimana, jika belanja pemerintah turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik, dan ketika belanja pemerintah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Dengan kata lain, adanya kenaikan pada belanja daerah justru akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.2324. Hal ini dapat disebabkan karena belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bias jadi ditujukan untuk belanja yang kurang produktif. Penelitian Wahab (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah untuk konsumsi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja pemerintah pada investasi memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan. Dampak yang signifikan positif dari belanja produktif pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga ditemukan oleh Angelopoulos (2007).

Adanya kenaikan pada belanja yang tidak produktif dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan dan tingkat tabungan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kenaikan pada belanja yang tidak produktif tidak memiliki dampak langsung terhadap produktivitas sektor swasta. Masyarakat hanya mendapatkan bagian kecil dari pengembalian investasi mereka, sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan yang rendah pula (Barro 1990). Adapun penelitian Landau (1983) serta Barth dan Bradley (1987) dalam Barro (1990) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan negatif antara pertumbuhan dengan belanja pemerintah pada 16 negara OECD pada periode 1971-1983. Belanja pemerintah yang digunakan untuk konsumsi pemerintah, memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan dan tingkat tabungan.

Apabila dilihat dari persentase belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, tampak bahwa sebagian besar belanja diaokasikan untuk belanja tidak langsung, seperti: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, yang notabene merupakan belanja non produktif. Hal ini cukup menjelaskan mengapa dampak dari belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota justru negatif terhadap pertumbuhan.

#### **4.4. Analisis Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah**

Tujuan terakhir dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa dari ketiga pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak properti/BPHTB), manakah yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil dari pengujian elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap ketiga pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pajak daerah yang memiliki elastisitas paling besar ialah pajak hotel dan restoran. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien variabel pertumbuhan ekonomi terhadap masing-masing pajak daerah. Secara berturut-turut koefisien untuk pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak BPHTB ialah sebesar 3.734, 0.783, 2.086. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang paling berpotensi untuk didorong meningkatkan penerimaan daerah ialah pajak hotel dan restoran.

Namun pajak hotel dan restoran ternyata tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel populasi. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak dari pajak hotel dan restoran sebagian besar ialah pendatang, bukan merupakan penduduk asli daerah yang bersangkutan. Untuk variabel populasi, pengaruh yang paling besar terhadap pajak daerah ialah pada pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak dari pajak penerangan jalan merupakan masyarakat/penduduk asli daerah yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa dengan semakin bertambahnya populasi maka akan semakin meningkatkan pajak penerangan jalannya.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi saling terkait satu sama lain. Apabila pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan. Sebaliknya, apabila pemerintah memiliki fokus kebijakan untuk meningkatkan kondisi makro daerahnya (meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi), pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mendorong kondisi fiskal, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Akan tetapi, terdapat satu hal yang tidak sejalan dengan teori *Aggregate Output* Keynesian dalam penelitian ini. Jika dalam teori tersebut hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan demikian, apabila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, peningkatan penerimaan pajak daerah dapat menjadi rekomendasi kebijakan ke depannya.

Dalam model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1990) belanja produktif dari pemerintah (belanja infrastruktur, sekolah atau pendidikan, sanitasi atau kesehatan) yang dibiayai dari penerimaan pajak ialah mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Artinya, belanja produktif pemerintah sebagai investasi publik memiliki dampak terhadap produktivitas investasi privat, dimana belanja tersebut dibiayai dari pajak. Apabila investasi publik dan privat meningkat maka akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak dari pajak sendiri, apabila pajak yang dipungut dialokasikan untuk belanja yang produktif maka akan berdampak signifikan positif terhadap pertumbuhan.

Selanjutnya, menurut teori *Aggregate Output* pajak memiliki dampak yang negatif terhadap GDP dan pertumbuhan. Apabila dilihat dari model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1990), kemungkinan alokasi pajak masuk pada pos belanja pemerintah tidak produktif, sehingga memiliki dampak negatif. Padahal, apabila penerimaan pajak dialokasikan untuk belanja produktif pemerintah, diharapkan akan memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori tersebut kemudian menjelaskan hasil penelitian ini, bahwa penerimaan pajak daerah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan ekonometrik menunjukkan apabila ada kenaikan penerimaan pajak sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.68.

Hasil dari penelitian ini juga memberikan masukan secara spesifik mengenai jenis pajak apa yang paling memiliki potensi dalam rangka peningkatan kondisi fiskal daerah (pajak daerah), yaitu pajak hotel dan restoran. Ketiga jenis pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak daerah BPHTB) yang digunakan dalam estimasi penelitian ini semuanya secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pajak yang memiliki pengaruh paling besar dari adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi ialah pajak hotel dan restoran, yang kedua ialah pajak daerah BPHTB dan yang terakhir adalah pajak penerangan jalan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kebijakan fiskal (pajak daerah) dan makroekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi) memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Apabila pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kondisi fiskal daerah, maka pemerintah daerah dapat mendorongnya dengan mendorong aktifitas ekonomi daerah atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila pemerintah ingin meningkatkan kondisi makro ekonomi daerahnya maka pemerintah dapat meningkatkan *tax force* atau meningkatkan pajak daerahnya. Pajak daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang memiliki potensi dalam peningkatan penerimaan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah pajak hotel dan restoran, yang kedua ialah pajak daerah BPHTB. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan, variabel yang berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan ialah populasi atau peningkatan jumlah penduduk.

Penelitian ini menggunakan data yang tersedia selama periode 2011 sampai dengan 2014 sebab salah satu variabel pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini – pajak BPHTB – baru, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih jangka panjang untuk meneliti hubungan antara kebijakan fiskal baik pajak daerah dan belanja daerah terhadap makroekonomi daerah atau pertumbuhan ekonomi. Selain itu dibutuhkan adanya penambahan variabel instrumen di luar jumlah populasi untuk menghindari adanya hasil yang bias dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J, dan Ducpham, T, 2013, The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis, *Economic Modelling*, Vol 31 pp 492-501.
- Angelopoulos, Konstantinos, George Economides, dan Pantelis Kammis, 2007, Tax-spending policies and economic growth: Theoretical predictions and evidence from the OECD, *European Journal of Political Economy*, Vol. 23 (4) 885 – 902, Elsevier.

- Bajo-Rubio, Oscar and Antonio G, Gomez-Plana, 2015, Alternative Strategies to reduce public deficits: Taxes vs Spending, *Journal of Applied Economics*, Vol. 18 (1) 45 – 70.
- Barro, Robert J, 1990, Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, *The Journal of Political Economy*, Vol. 98, (5), Part 2, JSTOR.
- Branson, Johannah dan C, A, Knox Lovell, 2000, *Taxation and Economic Growth in New Zealand: Taxation and the Limits of Government*, Scully, Gerald W, dan Patrick J, Cragata (Eds,), First Edition, pp 37-88, Springer US Publishers.
- Bruckner, Markus, (2012), An instrumental variabels approach to estimating tax revenue elasticities: Evidence from Sub-Saharan Africa, *Journal of Development Economics*, Vol. 98 pp 220-227.
- Bunescu, Liliana dan Carmen Comaniciu, 2013, Tax Elasticity Analysis in Romania: 2001 – 2012, *Procedia Economics and Finance*, Vol 6 pp 609 – 614, Sciencedirect, Elsevier.
- Creedy, John dan Norman Gemmell, 2008, Corporation tax buoyancy and revenue elasticity in the UK, *Journal of Economic Modelling*, Vol. 25 pp 24-37, Sciencedirect.
- Engen, Eric and Jonathan Skinner, 1996, Taxation and Economic Growth, *National Tax Journal*, Vol. 49 (4) pp 617 – 42, Washington.
- Froyen, Richard T., 2002, *Macroeconomics: Theories and Policies*, Seventh Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Goudswaard, K. dan Van De Kar, H, 1994, The impact of demographic change on Tax Revenue, *Atlantic Economic Journal*, Vol. 22 Issue 3 pp. 52 – 60.
- Gui-Diby, Steve Loris, 2014, Impact of Foreign Direct Investments on Economic Growth in Africa: Evidence from Three Decades of Panel Data Analyses, *Research in Economics*, Vol 68 (3) 248 – 256, Elsevier.
- Hayford, Marc D, 2016, The impact of temporary tax changes on consumption: 2000 – 2015, *The Journal of Economic Asymmetries*, in press, Elsevier, Sciencedirect.
- Kaminsky, G, L., Reinhart, C, M, dan Végh, C, A, (2005), When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies, *In NBER Macroeconomics Annual 2004*, Vol, 19 pp 11-82, MIT Press,
- Kargbo, Brima Ibrahim Baimba dan Festus O, Egwaikhide, 2012, Tax Elasticity in Sierra Leone: A Time Series Approach, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 2 (4) 432-447, Econjournals.
- Kaushik, Krishan K, dan K, K, Klein, 2008, Export Growth, Export Instability, Investment and Economic Growth in India: A Time Series Analysis, *The Journal of Developing Areas*, Vol. 41 (2) 155-170, JSTOR, College of Business, Tennessee State University.
- Khusaini, Mohammad, 2006, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta, Erlangga.
- Lee, M, 2013, A Study on Business Cycle Synchronization in Advanced Economies: The Effect of Economic and Political Determinants, *Doctoral Dissertation*, Department of Economics, University of Utah.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Edisi II), Yogyakarta, Andi.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Noord, Paul Van Den, 2000, The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizer in the 1990s and beyond, *Economics Department Working Papers No. 230*, Paris OECD.
- Sang-Hyop Lee, Jungsuk Kim dan Donghyun Park, 2016, Demographic Change and Fiscal Sustainability in Asia, *Demographic Social Indicators Research Journal*, pp 1 – 36.
- Sidik, Machfud, 2002, *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Penciptaan Tujuan Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta.
- Steve, White dan Steve H, Murdock, 1998, The importance of demographic analyses in state- and local-level policy evaluations: A case study analysis of property taxes in Texas, USA, *Population Research and Policy Review*, Vol. 17 (2) pp 167 – 196.
- Sujjapongse, Somchai, 2005, Tax Policy and Reform in Asian Countries: Thailand's Perspective, *Journal of Asian Economics*, Vol 16 pp 1012 – 1028, Sciencedirect, Elsevier.
- Talvi, E. dan Vegh, C, A, 2005, Tax base variability and procyclical fiscal policy in developing countries, *Journal of Development economics*, Vol 78(1) pp 156-190.
- Todaro, Michael P, dan Stephen C, Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi: Jilid Satu*, Edisi Kesembilan, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Wahab, Mahmoud, 2011, Asymmetric output growth effects of government spending: Cross-sectional and panel data evidence, *Journal of International Review of Economics and Finance*, Vol. 20 pp 574 – 590, Elsevier.